



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 8117 K/80/MEM/2016

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI
HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
UNTUK TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara untuk Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Konsultasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota Penghasil Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA UNTUK TAHUN 2017.

KESATU : Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara untuk tahun 2017 direncanakan terdiri atas daerah penghasil:

a. iuran tetap sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) kabupaten, 17 (tujuh belas) kota, dan 3 (tiga) provinsi; dan

b. iuran produksi sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) kabupaten, 5 (lima) kota, dan 2 (dua) provinsi,

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

KEDUA : Dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. perkiraan penerimaan dari iuran tetap yang dihitung dari luas wilayah x tarif (sesuai dengan tahapan kegiatan); dan

b. perkiraan penerimaan dari iuran produksi (royalti) dihitung dari volume penjualan x tarif x harga jual.

KETIGA : Penetapan daerah penghasil sumber daya alam mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. daerah penghasil iuran tetap adalah provinsi atau kabupaten/kota dimana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaan negara; dan
- b. daerah penghasil iuran produksi (royalti) adalah provinsi atau kabupaten/kota dimana terdapat lokasi tambang yang telah berproduksi dan menghasilkan komoditas tambang yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Para gubernur yang bersangkutan
9. Para bupati/walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,




Hufron Asrofi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 8117 K/80/MEM/2016

TANGGAL : 30 Desember 2016

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA
BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA UNTUK
TAHUN 2017

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
UNTUK TAHUN 2017

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap	Iuran Produksi (Royalti)
I.	Aceh	11.407.829.643,51	9.172.961.322,92
1.	Kabupaten Aceh Barat	2.109.256.167,01	8.218.227.590,86
2.	Kabupaten Aceh Besar	280.671.165,20	213.515.258,79
3.	Kabupaten Aceh Singkil	2.374.823.383,59	-
4.	Kabupaten Aceh Tengah	622.223.120,33	-
5.	Kabupaten Bireuen	200.333.433,11	-
6.	Kabupaten Gayo Lues	282.436.174,60	-
7.	Kabupaten Nagan Raya	3.124.223.900,95	614.133.545,87
8.	Kabupaten Pidie	2.322.708.226,97	127.084.927,41
9.	Kota Subulussalam	91.154.071,75	-
10.	Pemerintah Provinsi Aceh	-	-
II.	Banten	4.614.098.189,81	24.694.628.652,99
1.	Kabupaten Lebak	3.674.601.855,40	51.640.171,39
2.	Kabupaten Pandeglang	939.496.334,41	24.642.988.481,59
III.	Bengkulu	2.513.509.560,46	171.964.092.322,55

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap	Iuran Produksi (Royalti)
1.	Kabupaten Bengkulu Tengah	365.034.355,65	33.324.117.775,51
2.	Kabupaten Bengkulu Utara	1.359.865.072,18	124.965.441.658,15
3.	Kabupaten Kaur	572.194.987,85	41.939.253,46
4.	Kabupaten Lebong	75.674.576,77	7.952.346.287,34
5.	Kabupaten Seluma	140.740.568,01	5.680.247.348,10
IV.	Daerah Istimewa Yogyakarta	143.407.329,78	-
1.	Kabupaten Kulon Progo	143.407.329,78	-
V.	Gorontalo	19.102.178.646,13	-
1.	Kabupaten Boalemo	371.856.255,76	-
2.	Kabupaten Bone Bolango	2.871.881.296,33	-
3.	Kabupaten Gorontalo	4.254.250.182,86	-
4.	Kabupaten Gorontalo Utara	4.515.923.308,31	-
5.	Kabupaten Pohuwato	7.088.267.602,87	-
VI.	Jambi	11.960.192.707,65	88.270.056.290,17
1.	Kabupaten Batanghari	1.246.840.324,56	20.921.037.415,90
2.	Kabupaten Bungo	319.650.826,76	26.285.405.984,08
3.	Kabupaten Merangin	1.508.576.224,12	1.195.427.839,64
4.	Kabupaten Muaro Jambi	1.496.871.418,09	6.705.460.710,22
5.	Kabupaten Sarolangun	3.005.147.065,62	29.854.774.300,60
6.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1.876.375.884,40	213.161.190,35
7.	Kabupaten Tebo	2.506.730.964,12	3.094.788.849,38
VII.	Jawa Barat	9.802.314.278,63	35.954.351.479,53
1.	Kabupaten Bogor	871.233.622,73	31.382.709.617,83
2.	Kabupaten Ciamis	160.104.182,55	-

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap	Iuran Produksi (Royalti)
3.	Kabupaten Cianjur	2.533.181.238,75	469.921.790,17
4.	Kabupaten Garut	3.631.389.550,35	167.064.852,47
5.	Kabupaten Pangandaran	187.443.682,64	-
6.	Kabupaten Purwakarta	6.702.690,45	-
7.	Kabupaten Sukabumi	2.209.321.744,16	323.118.129,93
8.	Kabupaten Tasikmalaya	202.937.567,00	3.611.537.089,13
VIII.	Jawa Tengah	433.801.985,48	328.825.477,14
1.	Kabupaten Cilacap	138.379.346,80	328.825.477,14
2.	Kabupaten Klaten	498.523,76	-
3.	Kabupaten Wonogiri	294.924.114,93	-
IX.	Jawa Timur	2.371.659.138,98	223.616.326,63
1.	Kabupaten Blitar	425.473,41	-
2.	Kabupaten Jember	13.925.696,13	85.697.379,13
3.	Kabupaten Lumajang	65.405.465,98	117.143.882,80
4.	Kabupaten Pacitan	172.374.116,44	-
5.	Kabupaten Trenggalek	2.119.524.664,71	-
6.	Kabupaten Tulungagung	3.722,31	20.775.064,69
X.	Kalimantan Barat	179.755.614.415,56	12.619.760.277,60
1.	Kabupaten Bengkayang	1.807.853.597,41	-
2.	Kabupaten Kapuas Hulu	6.935.991.354,67	22.649.008,85
3.	Kabupaten Kayong Utara	9.961.293.481,83	69.104.641,30
4.	Kabupaten Ketapang	87.962.876.810,19	6.630.742.443,94
5.	Kabupaten Kubu Raya	698.005.878,08	-
6.	Kabupaten Landak	20.760.860.431,69	-
7.	Kabupaten Melawi	3.678.130.582,03	-

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap	Iuran Produksi (Royalti)
8.	Kabupaten Mempawah	5.325.169.572,59	-
9.	Kabupaten Sambas	313.335.913,34	-
10.	Kabupaten Sanggau	27.539.502.233,38	5.671.272.346,84
11.	Kabupaten Sekadau	708.019.819,16	225.991.836,67
12.	Kabupaten Sintang	13.137.213.990,52	-
13.	Kota Pontianak	927.360.750,68	-
XI.	Kalimantan Selatan	45.175.472.443,49	2.547.289.803.342,52
1.	Kabupaten Balangan	3.162.065.726,56	635.783.421.743,30
2.	Kabupaten Banjar	5.544.479.019,40	56.740.783.242,44
3.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2.022.879.205,59	172.185.810.436,93
4.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	512.151.016,82	-
5.	Kabupaten Kotabaru	5.793.477.274,68	203.851.163.637,51
6.	Kabupaten Tabalong	4.799.722.976,46	391.027.906.306,27
7.	Kabupaten Tanah Bumbu	17.897.047.847,95	647.961.047.741,01
8.	Kabupaten Tanah Laut	4.433.048.643,49	191.121.207.542,42
9.	Kabupaten Tapin	1.010.600.732,54	248.618.462.692,64
XII.	Kalimantan Tengah	243.262.566.121,76	652.766.024.414,76
1.	Kabupaten Barito Selatan	12.617.509.217,69	5.253.504.467,97
2.	Kabupaten Barito Timur	17.767.060.878,13	46.769.372.027,94
3.	Kabupaten Barito Utara	66.657.725.738,10	136.003.283.779,09
4.	Kabupaten Gunung Mas	25.163.367.984,90	81.683.862.660,74
5.	Kabupaten Kapuas	31.584.021.220,08	147.791.606.557,68

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap	Iuran Produksi (Royalti)
6.	Kabupaten Katingan	7.173.502.562,47	21.579.054.996,39
7.	Kabupaten Kotawaringin Barat	1.049.841.576,67	149.679.901,08
8.	Kabupaten Kotawaringin Timur	5.504.518.378,03	8.708.170.717,48
9.	Kabupaten Lamandau	4.466.437.846,19	7.722.517.761,42
10.	Kabupaten Murung Raya	62.413.913.988,63	196.784.747.626,50
11.	Kabupaten Seruyan	4.078.426.836,38	180.348.008,04
12.	Kabupaten Sukamara	2.995.241.055,60	-
13.	Kota Palangkaraya	1.790.998.838,88	139.875.910,42
14.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	-	-
XIII.	Kalimantan Timur	254.351.025.567,27	6.984.345.866.801,34
1.	Kabupaten Berau	27.258.404.673,50	525.864.767.826,73
2.	Kabupaten Kutai Barat	48.754.443.900,35	398.572.584.615,71
3.	Kabupaten Kutai Kartanegara	83.987.021.606,18	2.184.852.285.206,11
4.	Kabupaten Kutai Timur	58.567.746.291,31	2.839.349.034.364,76
5.	Kabupaten Paser	16.711.561.995,38	836.996.133.947,56
6.	Kabupaten Penajam Paser Utara	9.356.281.144,40	23.230.666.302,93
7.	Kota Balikpapan	102.019.136,47	-
8.	Kota Bontang	3.285.006.512,85	-
9.	Kota Samarinda	6.328.540.306,82	175.480.394.537,53
XIV.	Kalimantan Utara	38.005.116.562,07	522.784.818.025,69
1.	Kabupaten Bulungan	16.586.339.945,46	60.993.823.191,71
2.	Kabupaten Malinau	4.030.838.157,45	184.230.727.697,06

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap	Iuran Produksi (Royalti)
3.	Kabupaten Nunukan	13.014.174.238,30	229.401.648.316,09
4.	Kabupaten Tana Tidung	4.373.764.220,86	48.158.618.820,83
XV.	Kepulauan Bangka Belitung	107.057.857.929,85	348.387.757.692,69
1.	Kabupaten Bangka	10.031.063.305,27	48.809.273.296,36
2.	Kabupaten Bangka Barat	13.484.459.003,18	47.078.796.792,23
3.	Kabupaten Bangka Selatan	12.625.739.023,33	46.795.795.814,62
4.	Kabupaten Bangka Tengah	3.533.890.129,98	32.184.008.497,08
5.	Kabupaten Belitung	3.761.186.875,83	37.769.554.107,76
6.	Kabupaten Belitung Timur	7.555.399.567,92	37.769.554.107,76
7.	Kota Pangkalpinang	333.658.456,27	27.305.220.591,00
8.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	55.732.461.568,07	70.675.554.485,87
XVI.	Kepulauan Riau	22.386.916.268,88	88.908.219.361,53
1.	Kabupaten Bintan	91.038.628,27	-
2.	Kabupaten Karimun	9.356.998.752,73	59.272.146.241,02
3.	Kabupaten Lingga	3.745.537.930,64	3.292.897.013,39
4.	Kota Tanjungpinang	154.427.204,06	-
5.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	9.038.913.753,19	26.343.176.107,12
XVII.	Lampung	2.792.744.753,91	5.046.236.245,39
1.	Kabupaten Lampung Selatan	31.841.754,55	-
2.	Kabupaten Lampung Tengah	7.049.272,14	-
3.	Kabupaten Mesuji	818.448.321,53	-
4.	Kabupaten Pesawaran	293.510.748,23	3.668.647,82

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap	Iuran Produksi (Royalti)
5.	Kabupaten Tanggamus	1.237.217.482,68	4.973.074.450,13
6.	Kabupaten Tulang Bawang	199.409.502,42	-
7.	Kabupaten Way Kanan	205.267.672,36	69.493.147,44
XVIII.	Maiuku	4.283.389.892,12	831.967.089,89
1.	Kabupaten Maluku Barat Daya	4.283.389.892,12	831.967.089,89
XIX.	Maluku Utara	56.578.386.525,06	94.988.740.370,07
1.	Kabupaten Halmahera Barat	1.673.940.570,11	-
2.	Kabupaten Halmahera Selatan	9.378.141.347,29	41.741.217.945,16
3.	Kabupaten Halmahera Tengah	3.105.615.252,24	2.393.330.196,48
4.	Kabupaten Halmahera Timur	10.935.567.339,97	17.725.409.354,44
5.	Kabupaten Halmahera Utara	5.254.289.494,20	33.128.782.873,99
6.	Kabupaten Kepulauan Sula	24.062.025.841,30	-
7.	Kabupaten Pulau Morotai	357.531.660,86	-
8.	Kabupaten Pulau Taliabu	635.227.615,02	-
9.	Kota Tidore Kepulauan	1.176.047.404,07	-
XX.	Nusa Tenggara Barat	26.050.816.236,38	917.224.389.430,20
1.	Kabupaten Bima	2.536.189.102,43	-
2.	Kabupaten Dompu	58.212.835,68	-
3.	Kabupaten Lombok Barat	764.257.844,05	4.971.067,51
4.	Kabupaten Sumbawa	13.533.438.598,29	-
5.	Kabupaten Sumbawa Barat	9.158.717.855,91	917.219.418.362,69

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap	Iuran Produksi (Royalti)
XXI.	Nusa Tenggara Timur	10.552.502.770,61	713.233.331,52
1.	Kabupaten Alor	554.717.258,11	-
2.	Kabupaten Belu	2.614.609.098,72	166.846.305,00
3.	Kabupaten Ende	17.783.339,43	-
4.	Kabupaten Kupang	1.020.982.036,43	-
5.	Kabupaten Malaka	12.437.152,05	48.356,69
6.	Kabupaten Manggarai	484.361.645,32	-
7.	Kabupaten Manggarai Timur	64.318.536,63	64.491.683,05
8.	Kabupaten Nagekeo	45.061.325,68	36.041.851,32
9.	Kabupaten Sumba Tengah	673.196.110,87	-
10.	Kabupaten Sumba Timur	1.905.325.544,44	8.252.874,72
11.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1.242.930.095,65	94.929.372,33
12.	Kabupaten Timor Tengah Utara	1.916.780.627,29	342.622.888,42
XXII.	Papua	30.180.805.246,64	1.577.278.163.592,22
1.	Kabupaten Boven Digoel	312.742.271,25	-
2.	Kabupaten Jayapura	154.252.610,40	-
3.	Kabupaten Jayawijaya	397.911.105,83	-
4.	Kabupaten Keerom	1.579.063.746,29	-
5.	Kabupaten Mamberamo Raya	38.525.915,87	-
6.	Kabupaten Mimika	8.642.170.294,85	1.577.100.210.981,06
7.	Kabupaten Nabire	681.452.195,73	177.952.611,16
8.	Kabupaten Paniai	2.576.033.779,77	-
9.	Kabupaten Pegunungan Bintang	13.960.807.650,18	-
10.	Kabupaten Puncak Jaya	647.920.570,67	-
11.	Kabupaten Sarmi	196.631.772,73	-
12.	Kabupaten Tolikara	313.440.086,35	-

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap	Iuran Produksi (Royalti)
13.	Kabupaten Waropen	679.853.246,71	-
XXIII.	Papua Barat	1.811.194.248,94	774.026.348,47
1.	Kabupaten Kepulauan Raja Ampat	1.238.626.245,67	774.026.348,47
2.	Kabupaten Maybrat	320.935.901,36	-
3.	Kabupaten Teluk Bintuni	251.632.101,91	-
XXIV.	Riau	19.361.893.549,00	29.589.044.490,45
1.	Kabupaten Indragiri Hilir	1.171.384.593,07	14.249.104.009,23
2.	Kabupaten Indragiri Hulu	13.042.705.537,20	9.563.018.582,12
3.	Kabupaten Kampar	345.643.137,52	13.042.541,46
4.	Kabupaten Kepulauan Meranti	480.199.352,17	1.379.539.662,50
5.	Kabupaten Kuantan Singingi	3.569.160.810,68	4.384.339.695,15
6.	Kabupaten Rokan Hulu	752.800.118,35	-
XXV.	Sulawesi Barat	1.436.254.539,99	3.249.569,42
1.	Kabupaten Majene	1.447.848,59	-
2.	Kabupaten Mamuju	1.224.409.539,29	-
3.	Kabupaten Polewali Mandar	210.397.152,12	3.249.569,42
XXVI.	Sulawesi Selatan	30.931.068.774,05	194.282.957.172,48
1.	Kabupaten Barru	11.292.294,24	-
2.	Kabupaten Bone	3.698.846.010,86	456.876.892,00
3.	Kabupaten Bulukumba	14.006.889.710,56	48.621.849.606,23
4.	Kabupaten Enrekang	83.144.214,78	-
5.	Kabupaten Luwu	836.725.816,32	-
6.	Kabupaten Luwu Timur	9.868.179.172,48	145.201.494.598,70

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap	Iuran Produksi (Royalti)
7.	Kabupaten Luwu Utara	1.301.472.604,43	-
8.	Kabupaten Maros	17.784.668,82	-
9.	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	116.256.619,97	2.736.075,56
10.	Kabupaten Sinjai	356.092.832,23	-
11.	Kabupaten Tana Toraja	175.748.578,54	-
12.	Kabupaten Toraja Utara	199.988.832,22	-
13.	Kota Palopo	258.647.418,60	-
XXVII.	Sulawesi Tengah	100.428.535.617,34	108.384.096.957,00
1.	Kabupaten Banggai	24.568.281.777,91	120.535.348,03
2.	Kabupaten Buol	6.228.777.242,96	-
3.	Kabupaten Donggala	12.431.635.589,75	-
4.	Kabupaten Morowali	16.157.262.266,21	23.348.702.002,72
5.	Kabupaten Morowali Utara	16.828.851.857,02	84.914.859.606,26
6.	Kabupaten Parigi Moutong	4.196.685.711,22	-
7.	Kabupaten Poso	707.239.035,24	-
8.	Kabupaten Tojo Una-Una	13.624.337.643,56	-
9.	Kabupaten Toli-Toli	5.536.691.511,29	-
10.	Kota Palu	148.772.982,18	-
XXVIII.	Sulawesi Tenggara	43.767.559.969,83	178.440.942.988,11
1.	Kabupaten Bombana	4.146.827.520,83	7.230.220.077,88
2.	Kabupaten Buton	4.280.612.350,39	915.715.488,70
3.	Kabupaten Buton Utara	480.552.918,51	-
4.	Kabupaten Kolaka	4.700.833.985,10	142.144.662.713,74
5.	Kabupaten Kolaka Timur	132.948.601,82	-
6.	Kabupaten Kolaka Utara	8.821.141.104,05	4.655.081.562,25

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap	Iuran Produksi (Royalti)
7.	Kabupaten Konawe	5.791.888.632,35	1.058.413.321,08
8.	Kabupaten Konawe Kepulauan	662.982.350,84	-
9.	Kabupaten Konawe Selatan	4.489.828.594,12	11.549.565.767,93
10.	Kabupaten Konawe Utara	8.415.818.127,43	10.887.284.056,53
11.	Kota Bau-Bau	395.488.068,51	-
12.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	1.448.637.715,88	-
XXIX.	Sulawesi Utara	7.115.023.959,68	29.767.804.851,56
1.	Kabupaten Bolaang Mongondow	1.101.550.586,35	-
2.	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1.556.930.156,96	211.762.090,81
3.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	922.664.045,38	-
4.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	460.512.274,15	-
5.	Kabupaten Kepulauan Talaud	334.754.410,89	-
6.	Kabupaten Minahasa Selatan	509.059.079,85	-
7.	Kabupaten Minahasa Tenggara	196.830.281,42	-
8.	Kabupaten Minahasa Utara	1.849.138.403,37	23.053.937.016,86
9.	Kota Bitung	182.266.160,36	6.502.105.743,89
10.	Kota Manado	1.318.560,94	-
XXX.	Sumatera Barat	9.675.006.574,14	18.835.551.446,68
1.	Kabupaten Agam	57.882.995,09	-
2.	Kabupaten Dharmasraya	918.739.591,92	3.505.445.176,59
3.	Kabupaten Lima Puluh Kota	126.429.687,17	37.571.212,16
4.	Kabupaten Pasaman	2.270.134.780,05	-

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap	Iuran Produksi (Royalti)
5.	Kabupaten Pasaman Barat	212.735.002,53	-
6.	Kabupaten Pesisir Selatan	657.590.679,49	27.295.848,76
7.	Kabupaten Sijunjung	432.386.273,73	2.533.116.734,45
8.	Kabupaten Solok	2.357.495.811,86	427.086.266,77
9.	Kabupaten Solok Selatan	1.681.560.989,62	-
10.	Kabupaten Tanah Datar	89.051.145,66	-
11.	Kota Sawahlunto	870.999.617,01	12.305.036.207,93
XXXI.	Sumatera Selatan	130.122.393.849,42	1.611.770.446.577,85
1.	Kabupaten Banyuasin	9.346.163.850,71	8.476.890.920,35
2.	Kabupaten Empat Lawang	286.997.600,50	-
3.	Kabupaten Lahat	12.142.121.911,94	560.123.592.260,98
4.	Kabupaten Muara Enim	18.133.891.759,19	989.150.866.504,25
5.	Kabupaten Musi Banyuasin	57.500.861.822,85	35.821.422.191,72
6.	Kabupaten Musi Rawas	8.956.333.694,48	1.799.412.345,26
7.	Kabupaten Musi Rawas Utara	649.731.153,36	3.568.207.646,66
8.	Kabupaten Ogan Ilir	2.027.937.209,65	-
9.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	93.723.984,31	-
10.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	7.599.424.881,47	12.819.880.243,33
11.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	2.821.742.302,80	-
12.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	6.338.276.233,83	-
13.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	2.563.741.502,75	10.174.465,30
14.	Kota Prabumulih	1.661.445.941,59	-

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap	Iuran Produksi (Royalti)
XXXII.	Sumatera Utara	27.977.814.869,59	25.057.302.858,39
1.	Kabupaten Dairi	1.245.292.533,26	-
2.	Kabupaten Labuhanbatu	9.567.907,22	-
3.	Kabupaten Mandailing Natal	3.840.072.760,31	233.143.710,85
4.	Kabupaten Pakpak Bharat	3.872.963,26	-
5.	Kabupaten Tapanuli Selatan	7.911.149.587,30	24.824.159.147,54
6.	Kabupaten Tapanuli Tengah	2.970.632.831,57	-
7.	Kabupaten Tapanuli Utara	10.043.446.866,69	-
8.	Kabupaten Toba Samosir	540.039.151,37	-
9.	Kota Padang Sidempuan	1.413.740.268,62	-
Jumlah		1.455.408.952.166,01	16.280.698.935.107,80

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi